



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN GIZI NASIONAL
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LODEWYK PUSUNG**
2. Jabatan : **WAKIL KEPALA BADAN**
3. NHK : **1009320**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **58.725.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 351 m2/395 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000
2. Bangunan Seluas 0 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.500 m2/256 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000.000
4. Tanah Seluas 15.000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
5. Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 2.230 m2/96 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
8. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
9. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
10. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
11. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL



SENDIRI Rp. 800.000.000

12. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

13. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

14. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

15. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000

16. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 800.000.000

17. Tanah Seluas 60.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

18. Tanah Seluas 1.250 m2 di KAB / KOTA MINAHASA SELATAN,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

19. Tanah Seluas 150.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

20. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000

21. Tanah Seluas 7.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

22. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

23. Tanah dan Bangunan Seluas 1.250 m2/1.000 m2 di KAB / KOTA
MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

24. Tanah dan Bangunan Seluas 1.800 m2/216 m2 di KAB / KOTA
KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

25. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL
SENDIRI Rp. 600.000.000

26. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

27. Tanah Seluas 54.000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

28. Tanah Seluas 346.700 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

796.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI



Rp. 250.000.000

2. MOTOR, KAWASAKI LX150F Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.0003. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.0004. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 300.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 719.791.335

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 60.540.791.335

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 60.540.791.335

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.